

RESESI SUDAH SAMPAI GERBANG

Oleh Tim Riset Majalah Stabilitas LPPI

Ungkapan Harry S Truman tersebut selaras dengan kondisi perekonomian global dan Indonesia. Indonesia belum memasuki resesi, apalagi depresi, namun pertanda ke arah sana sudah muncul. Meski pada level ekonomi global pertumbuhan PDB dunia masih positif, sudah ada beberapa tetangga kita yang kehilangan “pekerjaannya”. Mereka sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif. Oleh karenanya diperlukan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif dalam menghadapi ancaman resesi.

*When your neighbors lose
their job, it's a recession.
When you lose your job,
that's a depression!*

Negara yang sudah merasakan tumbuh negatif adalah Jerman. Pada kuartal kedua 2019, perekonomian Jerman tumbuh negatif. Data kantor statistik Jerman mengungkapkan, Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman merosot 0,1 persen jika dibandingkan dengan kuartal pertama. Apabila dilihat secara tahunan (year on year /yoy) antara kuartal kedua 2018 – kuartal kedua 2019, pertumbuhan ekonomi Jerman tumbuh negatif 0,4 persen. Salah satu faktor utamanya adalah merosotnya kinerja ekspor negara manufaktur tersebut.

Pertumbuhan menggembirakan juga melanda perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2019 Indonesia sebesar 5,05 persen yoy. Angka pertumbuhan tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk pemerintah sendiri. Apa pasal? Pada kuartal pertama tersebut terdapat aktivitas pendorong konsumsi nasional yang menjadi langganan booster pertumbuhan ekonomi kuartal kedua yakni lebaran. Selain lebaran terdapat bonus yakni pemilu langsung. Akan tetapi pertumbuhan masih tidak optimal.

Symptom

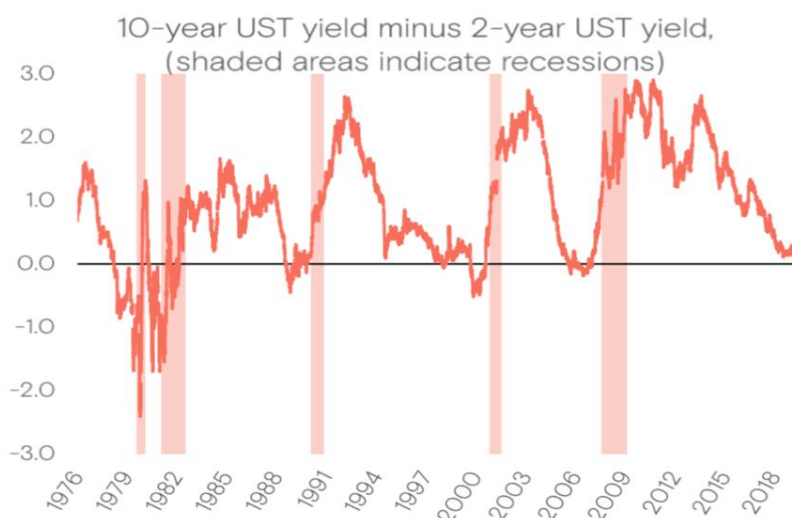
Sebelum tetangga terdekat kita di Asia benar-benar ‘kehilangan pekerjaannya’, pertanda resesi telah menghantui Indonesia dengan ciri perlambatan ekonomi yang kian kentara. Perlambatan ini setidaknya bisa dilihat dari eksternal, fiskal dan sektor moneter/keuangan di Indonesia.

Dalam laporannya yang berjudul “Global Economic Risks and Implication for Indonesia” yang terbit September 2019, Bank Dunia telah mengidentifikasi beberapa indikasi yang dapat menimbulkan resesi global.

Pertama, gejala resesi yang disebabkan pasar obligasi pemerintah AS. Dalam sejarah resesi di AS umumnya dimulai dengan simtom kurva yield berbalik (inverted yield curve) atas surat utang AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun. Artinya, yield obligasi pemerintah AS bertenor jangka panjang (10 tahun) justru lebih kecil dibandingkan yield obligasi jangka pendek (2 tahun).



Selisih Yield Obligasi Pemerintah AS Tenor 10 dan 2 Tahun



Sumber: The World Bank, 2019

Kedua, mesin ekonomi di kawasan Uni Eropa menunjukkan tren pelemahan. Pertumbuhan ekonomi Eropa menunjukkan perlambatan dari 1,2 persen (Q1-2019) menjadi 1,1 persen (Q2-2019). Turki sebagai salah satu anggota G20 tidak luput dari serangan resesi ekonomi. Turki dalam dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dari -2,4 persen (Q1-2019) menjadi -1,5 persen (QII-2010).

Begitupun dengan Jerman yang notabene penguasa ekonomi Eropa telah bersiap menghadapi badai resesi yang lebih besar. Menurut Macroeconomic Policy Institute kemungkinan Jerman jatuh dalam jurang resesi mencapai hampir 60 persen. Sektor manufaktur Jerman yang mengandalkan pasar ekspor telah terpapar dampak perang dagang AS – China serta gejala Brexit. Akibat melemahnya sektor manufaktur Jerman, ekonomi ‘negara mesin’ itu pun terus merosot dari 0,7 persen (Q1-2019) menjadi 0,4 persen (Q2-2019).

Ketiga, perang dagang telah berimbas pada kinerja ekonomi China. Pertumbuhan ekonomi China telah menyentuh level terendah dalam tiga dekade terakhir yaitu hanya sebesar 6,2 persen pada kuartal kedua 2019. Output industri China tumbuh terlemah sejak tahun 2002, yaitu hanya naik 4,4 persen (yoy) per Agustus 2019, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Juli 2019 (4,8 persen). Padahal target output industri China dipatok pada level 6 persen. Turunnya output industri China tersebut tidak lepas akibat anjloknya ekspor China ke AS hingga 16 persen (yoy) per Agustus 2019. Dengan kondisi tersebut semakin sulit bagi China untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas level 6 persen.

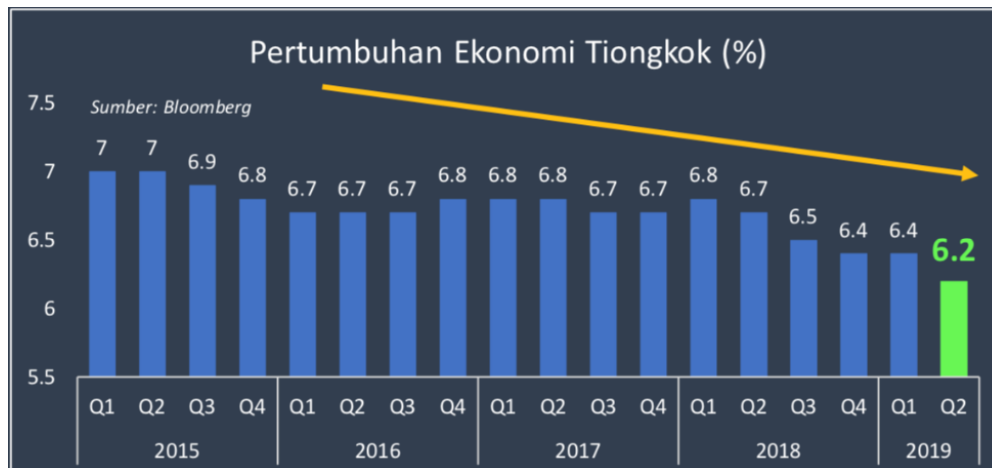
Bagi Indonesia, melemahnya pertumbuhan ekonomi China turut membawa dampak terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Buktinya, pertumbuhan net ekspor Indonesia pada semester pertama 2019 justru negatif 7,04 persen (yoy). Hal ini juga turut disebabkan turunnya Indeks harga komoditas ekspor (year to date) sebesar 3,4 persen per 2 September 2019. Tidak hanya itu, perang dagang antara AS dan UE juga berpotensi memperburuk neraca dagang Indonesia.



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Selama periode Januari-Agustus 2019, pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia ke Eropa turun 17 persen (yoy) atau senilai 9,58 miliar dollar AS.

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok



Sumber : Bloomberg, 2019

Dari sisi fiskal, perlambatan ekonomi terlihat jelas dari target penerimaan pajak yang masih jauh panggang dari api. Kementerian Keuangan mencatat, per semester I 2019 penerimaan pajak baru mencapai Rp801,16 triliun atau hanya tumbuh 0,21 persen yoy. Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan 2018. Perlambatan penerimaan pajak ini merupakan buah dari perlambatan ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan penerimaan pajak beberapa sektor negatif. Penerimaan pajak dari sektor manufaktur tumbuh negatif 2,6 persen (semester pertama 2019, yoy). Angka ini melambat dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebesar 13 persen. Pertumbuhan negatif pajak sektor manufaktur juga disebabkan oleh tingginya restitusi pajak yang tumbuh sekitar 30,8 persen.

Kemudian di sektor pertambangan, pertumbuhan penerimaan sektor pertambangan negatif 14 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 80,3 persen. Salah satu penyebab kontraksi ini adalah penurunan harga komoditas tambang di pasar global yang masih berlanjut. Pada sektor perdagangan, pertumbuhan sektor perdagangan hanya tumbuh 2,5 persen, berbeda dengan tahun lalu sebesar 27,6 persen.

Realisasi Penerimaan Pajak Januari – Agustus 2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - Agustus 2019		
		Δ% 2018 - 2019	% thd Target	
Pajak Penghasilan	894,45	494,21	3,08 %	55,25 %
- Migas	828,29	454,78	3,97 %	54,91 %
- Non Migas	66,15	39,42	-6,22 %	59,59 %
PPN & PPnBM	655,39	288,01	-6,36 %	43,95 %
PBB & Pajak Lainnya	27,71	18,94	52,41 %	68,34 %
Jumlah	1.577,56	801,16	0,21 %	50,78 %

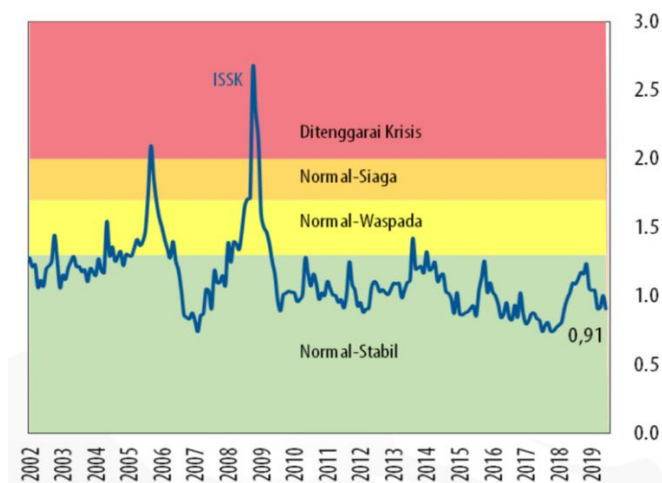
Sumber : Kementerian Keuangan, 2019



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Selain fiskal, sektor keuangan domestik juga dibayangi risiko yang relatif terkendali. Hal ini tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang masih berada di dalam zona normal dan stabil yang didukung oleh kondisi pasar keuangan dan permodalan perbankan yang baik. Buktinya, rasio kecukupan modal (CAR) perbankan terjaga di level 23,19 persen per Juli 2019. Likuiditas perbankan juga terjaga dengan indikator rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 19,1 persen per Juni 2019.

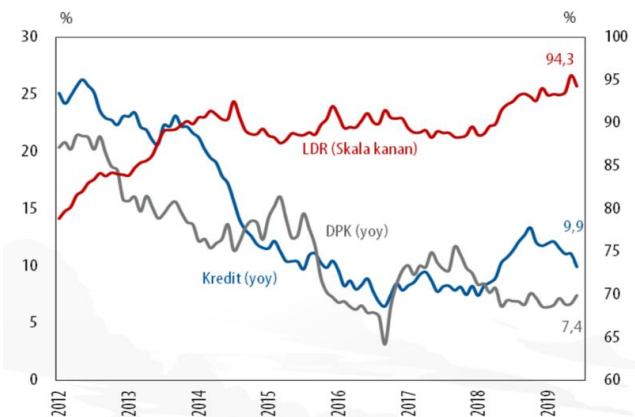
Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK)



Sumber: Bank Indonesia, 2019

Namun demikian, beberapa indikator perbankan yang perlu dicermati antara lain pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus mengalami penurunan sejak akhir 2018 hingga hanya tumbuh 7,4 persen (yoy) per Juni 2019. Di sisi lain, upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi tentunya perlu dukungan kucuran kredit perbankan yang juga mengalami perlambatan dari 11,1 persen (yoy) pada Mei 2019 menjadi 9,9 persen (yoy) pada Juni 2019. Tekanan terhadap pertumbuhan DPK pada gilirannya turut mendorong peningkatan loan to deposit ratio (LDR) yang telah menyentuh level 96,19 persen pada Mei 2019 meskipun kembali menurun menjadi 94,48 persen per Juli 2019.

Perkembangan DPK, Kredit, dan LDR



Sumber: Bank Indonesia, 2019



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Pertumbuhan kredit memang masih tumbuh di level 9,9 persen (yoy) per Juni 2019. Namun beberapa sektor mengalami pertumbuhan kredit yang lebih rendah antara lain sektor perdagangan (7,4 persen), industri (6,9 persen), pengangkutan dan telekomunikasi (8,5 persen), pertanian (8,6 persen), dan konsumsi rumah tangga (7,6 persen). Ketiga sektor (perdagangan, industri, dan konsumsi rumah tangga) mengambil porsi terhadap total kredit hingga mencapai 64 persen sehingga ketika kinerja kredit pada ketiga sektor tersebut terganggu maka secara keseluruhan performa kredit juga akan berimbas.

Indikator lain untuk melihat risiko sektor perbankan yaitu rasio kredit bermasalah (NPL). Secara umum, nilai NPL perbankan domestik masih terjaga di level 2,5 persen. Namun, secara sektoral terdapat beberapa sektor yang memiliki nilai NPL yang cukup tinggi antara lain sektor perdagangan (3,94 persen), konstruksi (3,67 persen), dan pertambangan (3,58 persen). Ketiga sektor tersebut berkontribusi terhadap 44,7 persen dari total kredit.

Penurunan harga komoditas pertambangan terutama batubara memang turut menekan kinerja emiten pertambangan sehingga berdampak pada peningkatan NPL. Begitupun dengan tren pelemahan permintaan konsumen terhadap properti menyebabkan performa perusahaan konstruksi ikut terpapar sehingga rasio kredit macetnya juga masih tinggi.

Risiko Kredit per Sektor Ekonomi

Sektor	NPL Gross (%)				Nominal NPL		
	2016	2017	2018	2019	Δ YTD (Rp T)		Share (%)
				Juni	Des-18	Jun-19	
Perdagangan	4.10	4.10	3.79	3.94	200	316	31.8
Lain-lain (konsumsi RT)	1.52	1.59	1.55	1.78	280	544	19.5
Industri	3.44	2.70	2.53	2.87	-464	357	18.9
Pengangkutan & Telekomunikasi	4.83	3.74	2.68	2.07	-1.47	-2.03	3.5
Konstruksi	3.86	3.67	3.14	3.67	1.21	3.31	9.3
Pertanian	2.23	1.41	1.33	1.46	-1.89	0.86	4.0
Jasa Dunia Usaha	1.95	1.63	1.52	1.65	-0.77	1.30	6.1
Jasa Sosial	2.10	1.86	1.41	1.78	0.21	0.26	1.9
Pertambangan	7.16	6.18	4.66	3.58	-2.02	-2.14	3.6
Listrik	1.64	1.08	1.33	0.86	-0.65	0.22	1.3
Tota	2.93	2.59	2.37	2.50	-5.21	13.95	100.0

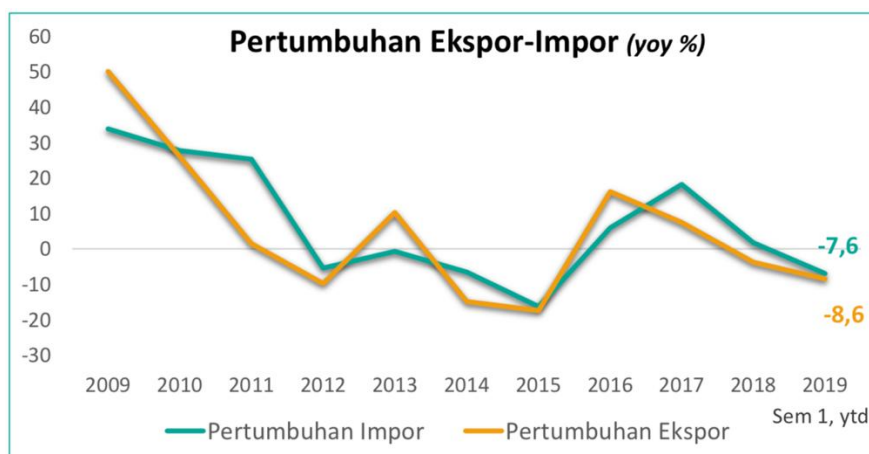
Sumber: Bank Indonesia, 2019

Jalur Resesi

Risiko perambatan resesi ke Indonesia bisa melalui dua jalur. Pertama jalur keuangan, kedua non keuangan. Risiko terjadinya resesi di jalur keuangan dan perbankan tidak dapat lepas dari kinerja sektor riil baik investasi maupun ekspor. Pertumbuhan investasi yang terwakili PMTB tercatat terus melambat dalam empat triwulan terakhir hingga hanya menyentuh level 5,01 persen per triwulan kedua 2019. Dari sisi ekspor, pertumbuhan ekspor masih dalam tren perlambatan yang dimulai sejak tahun 2016. Bahkan, pertumbuhan ekspor sepanjang semester pertama 2019 masih tercatat negatif sebesar -8,6 persen (yoy). Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia juga masih menorehkan defisit hingga 1,93 miliar dollar AS pada periode yang sama.



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia



Sumber: BPS dalam BKF, 2019

Terjerembabnya kinerja investasi dan ekspor tentu pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja sektor perbankan. Ketika sektor riil semakin sulit meningkatkan profitnya, maka penurunan DPK di sektor perbankan tidak bisa dielakkan.

Tidak itu saja, melemahnya permintaan global dan domestik juga mempengaruhi ekspansi bisnis sehingga permintaan terhadap kredit perbankan juga otomatis akan berkurang. Perpaduan antara pelemahan permintaan konsumen dengan gempuran produk-produk impor (akibat perang dagang) akan semakin menekan kinerja perusahaan domestik. Kondisi ini jelas mengakibatkan peningkatan risiko kredit macet di sektor perbankan.

Jalur non keuangan adalah melalui risiko fiskal berupa tidak tercapainya sasaran penerimaan negara akibat penerimaan pajak dan non pajak yang meleset. Kondisi ini menghasilkan dua hal: pemangkasan belanja atau memperlebar defisit APBN dengan menerbitkan SUN. Pemangkasan belanja akan berdampak pada kemampuan belanja pemerintah yang berkurang dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi. Penerbitan surat utang negara berisiko meningkatkan potensi gagal bayar utang di tengah kondisi perekonomian nasional yang melambat.

Melihat kemungkinan jalur perlambatan ekonomi tetap berlangsung, diperlukan kebijakan yang tepat. Kebijakan Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga acuan serta mendorong kecukupan likuiditas di pasar menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penurunan rasio Loan to Value (LTV) ataupun Financing to Value (FTV) yang dikeluarkan BI juga menjadi angin segar dalam menstimulus permintaan terhadap sektor riil. Dengan dukungan tersebut, diharapkan sektor riil bukan hanya dapat bertahan dari risiko perlambatan ekonomi. Tetapi juga dapat menciptakan momentum ekspansi demi memperbaiki kinerja ekspor dan neraca perdagangan Indonesia.

Dari sisi fiskal, pemerintah harus mengolaborasikan program-program antar kementerian. Selama ini, program antar kementerian terkesan berjalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh Kementerian Sosial memiliki Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Koperasi dan UKM memiliki belanja program peningkatan UKM di sebuah desa A, sedangkan pemerintah kabupaten/provinsi juga memiliki program kegiatan di desa A tersebut. Di sisi lain, dalam desa



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

A ini juga terdapat program dana desa. Keempat program tersebut di berbagai locus di Indonesia tidak jarang berjalan sendiri-sendiri.

Idealnya keempat jenis belanja tersebut harus saling terkait dan melengkapi. Contohnya untuk program PKH, bagi keluarga yang sudah mentas/terlepas/lulus dari program PKH, diharapkan menjadi sasaran program dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa setempat. Misalnya, anggota keluarga yang lulus sekolah dari keluarga penerima PKH bisa diutamakan untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes yang merupakan bagian dari program dana desa.

Kolaborasi di sisi fiskal tersebut, meski terkesan remeh temeh, akan menghasilkan belanja pemerintah yang efektif dan tepat sasaran. Kolaborasi fiskal tersebut bisa dikolaborasikan dalam jejaring yang lebih besar misal antar pemerintah dan swasta dengan tidak melupakan entitas moneter. Sekali lagi, kolaborasi menjadi kata kunci untukantisipasi resesi sebelum kita benar-benar “kehilangan pekerjaan”.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>
Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :
Divisi Riset, Pengembangan Program dan Fakultas (DRPF)
Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: riset@lppi.or.id
Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

